

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan rencana Program Kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merujuk pada tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan untuk dicapai melalui penetapan program-program dan kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang.

Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan.

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan RENJA PERUBAHAN ,Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahaun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sulawesi selatan Momor 243);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 103);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
  19. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (RENJA) PERUBAHAN merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun. Maksud penyusunan RENJA PERUBAHAN adalah sebagai dasar dan acuan dalam menyusun rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kesejahteraan sosial agar setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat menerangkan perencanaan kerja yang akan dilakukan pada tahun 2022, dan sejalan dengan upaya mewujudkan good governance yang mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 -2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ,Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Mendukung RPJP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025;
2. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;
3. Dasar untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Luwu Timur.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA POKOK DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sampai Dengan Triwulan Kedua**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
2. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang

telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berupaya dan berusaha memperbaiki kekurangan/kelemahan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik/Flash back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2022 Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

**Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022**  
**TRIWULAN II**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)	
					I		II		III		IV					
					7		8		9		10					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	-															
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi</b>	100%	3.610.259.625		#REF!		1.201.297.854	-	-	-	25%	1.721.219.269	25,00%	47,68%	
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	100%	114.465.010		11.200.000		30.406.000	-	-	-	25%	41.606.000	25,00%	36,35%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2	52.936.140	-	6.000.000	1	15.620.000	-	-	-	1	21.620.000	50,00%	40,84%	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	14.999.180	-	-	-	2.299.000	-	-	-	-	2.299.000	0,00%	15,33%	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.067.040	1	600.000	-	-	-	-	-	1	600.000	50,00%	<b>19,56%</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	43.462.650	4	4.600.000	2	12.487.000	-	-	-	6	17.087.000	60,00%	<b>39,31%</b>
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja administrtasi keuangan peranglat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.694.964.565</b>	-	<b>303.745.728</b>		<b>935.190.336</b>	-	-	-	25%	<b>1.238.936.064</b>	<b>25,00%</b>	<b>45,97%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	21	2.625.364.565	21	297.745.728	21	913.090.336	-	-	-	21	1.210.836.064	100,00%	<b>46,12%</b>
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	16	69.600.000	3	6.000.000	4	22.100.000	-	-	-	7	28.100.000	43,75%	<b>40,37%</b>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.830.000</b>	40	<b>16.160.000</b>	70	<b>11.195.000</b>	-	-	-	25%	<b>27.355.000</b>	<b>25,00%</b>	<b>45,72%</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10	59.830.000	4	16.160.000	2	11.195.000	-	-	-	6	27.355.000	60,00%	<b>45,72%</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>450.530.850</b>		<b>118.813.100</b>		<b>154.897.100</b>	-	-	-	25%	<b>273.710.200</b>	<b>25,00%</b>	<b>60,75%</b>

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7	3.307.500	4	1.648.000	-	-	-	-	-	-	4	1.648.000	57,14%	49,83%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1	33.102.150	1	6.652.750	1	9.675.850	-	-	-	-	1	16.328.600	100,00%	49,33%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	13.850.000	2	4.524.000	2	6.366.000	-	-	-	-	4	10.890.000	80,00%	78,63%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60	6.540.000	8	840.000	22	2.040.000	-	-	-	-	30	2.880.000	50,00%	44,04%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makan dan minum tamu dan pegawai	110	7.250.000	50	4.000.000	30	2.500.000	-	-	-	-	80	6.500.000	72,73%	89,66%
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410	386.481.200	82	101.148.350	180	134.315.250	-	-	-	-	262	235.463.600	63,90%	60,92%
	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>0%</b>	<b>24.700.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	1	16.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>108.210.000</b>	-	<b>18.462.707</b>		<b>22.621.348</b>					<b>25%</b>	<b>41.084.055</b>	<b>25,00%</b>	<b>37,97%</b>

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200	1.650.000	665	850.000	277	800.000	-	-	-	-	942	1.650.000	78,50%	<b>100,00 %</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48	58.560.000	12	9.612.707	12	9.821.348	-	-	-	-	24	19.434.055	50,00%	<b>33,19%</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3	48.000.000	3	8.000.000	3	12.000.000	-	-	-	-	6	20.000.000	200,00%	<b>41,67%</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>157.559.200</b>		<b>51.539.880</b>		<b>46.988.070</b>					<b>25%</b>	<b>98.527.950</b>	<b>25,00%</b>	<b>62,53%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11	104.400.000	4	25.739.880	3	26.438.070	-	-	-	-	7	52.177.950	63,64%	<b>49,98%</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	37	23.100.000	6	4.500.000	14	11.800.000	-	-	-	-	20	16.300.000	54,05%	<b>70,56%</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1	30.059.200	1	21.300.000	1	8.750.000	-	-	-	-	1	30.050.000	100,00%	<b>99,97%</b>
				3.610.259.625	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										90,93%	47,68%
					<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase PMKS yang diberikan Bantuan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>2.998.470.128</b>		<b>147.000.646</b>	<b>100</b>	<b>1.338.593.120</b>					-	<b>1.485.593.766</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,55%</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Prosentase Panti social yang menerima program</b>	<b>17,5</b>	<b>2.998.470.128</b>	-	<b>147.000.646</b>	-	<b>1.338.593.120</b>					-	<b>1.485.593.766</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,55%</b>

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya</b>														
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	39	2.998.470.128	-	147.000.646	39	1.338.593.120	-	-	-	39	1.485.593.766	100,00%	49,55%	
				2.998.470.128	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>								100,00%	49,55%		
					<b>Predikat Kinerja</b>								Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)(%)</b>	<b>100</b>	<b>1.017.095.485</b>		<b>26.881.620</b>	<b>96.07</b>	<b>780.741.100</b>	-	-	-	<b>96</b>	<b>807.622.720</b>	<b>96,07%</b>	<b>79,40%</b>	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (orang)	100	1.017.095.485		26.881.620	96.07	780.741.100	-	-	-	96	807.622.720	96,07%	79,40%	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	50	849.742.235	-	10.117.520	50	746.509.000					50	756.626.520	100,00%	89,04%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	1	43.520.000	-	1.100.000	1	8.075.000					1	9.175.000	100,00%	21,08%
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial (orang)	85	123.833.250	5	15.664.100	70	26.157.100	-	-	-	-	75	41.821.200	88,24%	33,77%
				1.017.095.485	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										98,57%	79,40%
					<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Tinggi	Tinggi
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	<b>100%</b>	<b>542.227.600</b>	<b>100</b>	<b>31.199.500</b>	-	<b>139.646.500</b>	-	-	-	-	100%	<b>170.846.000</b>	<b>100%</b>	<b>31,51%</b>

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	<b>1</b>	<b>542.227.600</b>	<b>-</b>	<b>31.199.500</b>		<b>139.646.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170.846.000</b>	<b>0%</b>	<b>31,51%</b>	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang miskin yang divalidasi (jiwa)	26073	284.772.600	53.734	20.470.500	54.871	43.477.500	-	-	-	81.170	63.948.000	100%	22,46%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial PKH (KK)	9000	257.455.000	9.227	10.729.000	9.183	96.169.000	-	-	-	18.410	106.898.000	100%	41,52%
				542.227.600	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>								100,00%	31,51%	
					<b>Predikat Kinerja</b>								Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat (%)</b>	<b>100</b>	<b>213.499.490</b>	<b>100</b>	<b>34.992.000</b>	<b>-</b>	<b>57.479.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>92.471.800</b>	<b>100,00 %</b>	<b>43,31%</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	<b>100</b>	<b>213.499.490</b>	<b>100</b>	<b>34.992.000</b>	<b>-</b>	<b>57.479.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>92.471.800</b>	<b>100,00 %</b>	<b>43,31%</b>

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan makanan (jiwa)	200	213.499.490	114	34.992.000	68	57.479.800	-	-	-	-	182	92.471.800	91,00%	43,31%
			0	0	-	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				213.499.490	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										91,00%	43,31%
					<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>119.880.000</b>		<b>6.000.000</b>		<b>17.645.000</b>		-	-	-	<b>0%</b>	<b>23.645.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>19,72%</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	<b>3</b>	<b>119.880.000</b>	-	<b>6.000.000</b>	<b>1</b>	<b>17.645.000</b>	-	-	-	-	-	<b>23.645.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>19,72%</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3	119.880.000	-	6.000.000	1	17.645.000	-	-	-	-	-	23.645.000	0,00%	19,72%
				119.880.000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										0,00%	19,72%
					<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga PEMERINTAH</b>	<b>75,25</b>	<b>177.151.665</b>		<b>22.370.000</b>		<b>35.229.400</b>		-	-			<b>57.599.400</b>	0,00%	<b>32,51%</b>
		<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	<b>24,75</b>	<b>177.151.665</b>						-	-				0,00%	<b>0,00%</b>

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	<b>7</b>	<b>112.279.625</b>		<b>15.450.000</b>	-	<b>31.929.400</b>	-	-	-	-	<b>7</b>	<b>47.379.400</b>	100,00%	<b>42,20%</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG (OPD)	39	112.279.625	39	15.450.000	390	31.929.400	-	-	-	-	39	47.379.400	100,00%	<b>42,20%</b>	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD</b>	<b>2</b>	<b>64.872.040</b>	-	<b>6.920.000</b>	-	<b>3.300.000</b>	-	-	-	-	-	<b>10.220.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,75%</b>	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	114	19.878.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39	44.994.000	39	6.920.000	39	3.300.000	-	-	-	-	39	10.220.000	100,00%	22,71%	
				177.151.665											<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		
																<b>Predikat Kinerja</b>	
																Tinggi	Sangat Rendah

8	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	72,73	836.463.354		52.731.709		181.632.906	-	-	-	415.377.615	-	50%	
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh</b>	11	33.713.106	-	-	60	11.333.106	-	-	-	60	11.333.106	5	34%
	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60	33.713.106	-	-	60	11.333.106	-	-	-	60	11.333.106	1	34%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	10	325.363.425		13.973.425	10	170.299.800	-	-	-	10	184.273.225	1	57%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10	325.363.425		13.973.425	10	170.299.800				10	184.273.225	1	57%

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	11	477.386.823	2	38.758.284	8	181.013.000	-	-	-	-	10	219.771.284	1	46%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	40	477.386.823	7	38.758.284	8	181.013.000	-	-	-	-	15	219.771.284	37,50%	46,04%
				836.463.354	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									64,33%	49,66%	
					<b>Predikat Kinerja</b>									Rendah	Sangat Rendah	
9	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga</b>	<b>0,9</b>	<b>60.000.600</b>		<b>6.970.600</b>		<b>14.105.000</b>		-		-		<b>21.075.600</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,13%</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)</b>	<b>50</b>	<b>60.000.600</b>	5	<b>6.970.600</b>	<b>10</b>	<b>14.105.000</b>	-	-	-	-	<b>15</b>	<b>21.075.600</b>	<b>30,00%</b>	<b>35,13%</b>
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50	60.000.600	5	6.970.600	10	14.105.000	-	-	-	-	15	21.075.600	30,00%	35,13%
				60.000.600	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									30,00%	35,13%	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

					<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota</b>	100%	40.777.000		2.000.000		3.000.000	-	-	-	-	5.000.000	0,00%	12,26%	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang diolah (dokumen )	1	40.777.000	-	2.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	5.000.000	0,00%	12,26%	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen )	1	40.777.000	-	2.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	5.000.000	0,00%	12,26%	
				40.777.000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										0,00%	12,26%
					<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	100%	180.255.245		22.655.695		43.033.200	-	-	-	-	65.688.895	0,00%	36,44%	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	54.999.550	-	-	-	38.603.200	-	-	-	-	38.603.200	0,00%	70,19%	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	54.999.550	-	-	-	38.603.200	-	-	-	-	-	38.603.200	0,00%	70,19%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>125.255.695</b>	-	<b>22.655.695</b>	-	<b>4.430.000</b>	-	-	-	-	-	<b>27.085.695</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,62%</b>
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	1	125.255.695	-	22.655.695	-	4.430.000	-	-	-	-	-	27.085.695	0,00%	21,62%
				180.255.245	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										0,00%	36,44%
					<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Rendah	Sangat Rendah
				<b>9.796.080.192</b>	<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>										<b>89,16%</b>	<b>49,67%</b>
					<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>										<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>



Dari table diatas hasil evaluasi Triwulan II terhadap renja tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja program Renja Triwulan II mencapai 89,16 % dengan kategori Tinggi dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.866.040.065 atau 49,67 persen.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap Kesejahteraan sosial.

Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melaksanakan penyusunan dan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Luwu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur terlihat masih banyak permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

### **2.2.1 Bidang Sosial**

Untuk meningkatkan dan menangani secara cepat dan tepat pelayanan bantuan pertolongan dan penanggulangan bencana serta masalah sosial yang ada merupakan salah satu upaya strategis bidang sosial bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang tertimpah bencana serta melakukan rehabilitasi bangunan Panti Asuhan yang sudah tidak layak ditempati, maka perlu :

1. Meningkatnya program peningkatan sarana dan prasarana aparat

2. Meningkatnya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana

### **2.2.2 Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak**

Dalam meningkatkan dan menangani permasalahan Perempuan dan Anak untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan, maka perlu :

- a. Peningkatan Jumlah kelompok organisasi perempuan yang dilatih tentang pengarusutamaan gender (penyusunan data terpilah untuk profil gender);
- b. Peningkatan Jumlah kelompok organisasi perempuan yang memahami data terpilah untuk penyusunan profil gender;
- c. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit;
- e. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- f. Peningkatan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- g. Peningkatan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- h. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- i. Peningkatan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. Peningkatan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

**TABEL 02 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. LUWU TIMUR**

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Proyeksi				Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	43,28	43,43	43,65	43,79	43,79	65,22	0	0	0	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,77	50,78	50,79	50,81	50,82	50,76	0	0	0	
3	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0	0	0	
4	Prosentase kekerasan terhadap Anak	0,02	0,017	0,016	0,015	0,015	0,01	0	0	0	
5	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100	100	100	100	100	100	0	0	0	
6	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100	100	100	64	0	0	0	

Jika dilihat Tabel 2 (**Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017**) di atas, hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur menunjukkan keberhasilan pencapaian yang dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan Triwulan kedua, peningkatan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program-program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial dengan cara mengukur berapa persen jumlah PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2022 target Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial adalah 43,28 persen. Realisasi capaian sampai dengan Triwulan kedua tahun 2022 mencapai 65,22 persen. Pencapaian target yang melebihi target yang ditetapkan ini disebabkan meningkatnya data PMKS yang ada terutama pada jenis PMKS Fakir miskin yang menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Non Tunai .

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diperoleh dari hasil Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Trwiwulan kedua tahun 2022 berkisar 50,76

Indikator kinerja Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari hasil laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sampai dengan Triwulan Kedua kasus-kasus korban kekerasan cukup meningkat signifikan dengan realisasi 0,02 persen dan kasus kekerasan terhadap anak sebesar 0,01 persen.

Indikator kinerja Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani yang diperoleh dari penanganan kejadian-kejadian bencana alam berupa kebakaran, banjir, angin putting beliung, dsb yang ditangani.

Dan hasil penanganan korban bencana sampai dengan triwulan kedua tahun 2022 sebanyak 182 jiwa.

Indikator kinerja Persentase capaian kinerja program perangkat daerah yang diperoleh dari hasil capaian kinerja program yang mencapai 64 persen

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan penyandang kesejahteraan masalah sosial masih tergantung dari bantuan. Dalam menangani urusan sosial terutama pada penyandang masalah kesejahteraan sosial terkadang tidak sesuai dengan perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai sektor. Adanya pendataan berbasis system informasi teknologi yang lebih akurat dan mempercepat proses pemberian bantuan, pemberdayaan PMKS, serta banyaknya rekan kerja hingga ke wilayah terkecil pedesaan dengan dibantu para kader.

Isu yang terpenting sampai saat ini adalah adanya dampak dari pandemik corona virus deaseas tahun 2019 atau covid 19 yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin. Hal ini berdampak langsung kepada masyarakat miskin.

- b. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan

masih kurangnya pemahaman hukum dalam kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat . Oleh karenanya Dinas Sosial P3a Kabupaten Luwu Timur melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan terjadi bukan hanya disebabkan dari factor pelaku, namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Luwu Timur Kabupaten Layak Anak serta mengupayakan pembentukan UPTD Penanganan Korban Kekerasan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2022. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disajikan pada table berikut: Guna pencapaian program prioritas Pembangunan sektor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu

**TABEL 03 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>3.610.259.625</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>3.620.488.468</b>	
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>114.465.010</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>123.400.010</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	52.936.140	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	76.481.140	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	14.999.180	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	5.039.180	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3.067.040	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3.067.040	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	43.462.650	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	38.812.650	
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.694.964.565</b>	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.517.594.908</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	21 org	2.625.364.565	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	22 org	2.445.324.908	
	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		69.600.000	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		72.270.000,	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.830.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.830.000</b>	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 orang	59.830.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 orang	59.830.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>450.530.850</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>554.565.550,00</b>	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.500,00	
Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33.102.150	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	42.211.650,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	13.850.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	17.050.000,00	
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000,00	
Fasilitas Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	7.250.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	7.250.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	405 kali	386.481.200	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410 kali	478.206.400,00	
<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>24.700.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>24.700.000</b>	
Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	1 jenis	8.000.000	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	1 jenis	8.000.000	
Pengadan Peralatan dan mesin lainnya	-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Jenis	16.700.000	Pengadan Peralatan dan mesin lainnya	MALILI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Jenis	16.700.000	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>108.210.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>96.510.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1250 nomor	1.650.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1250 nomor	1.650.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	58.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	42.060.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	<b>108.210.000</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	52.800.000,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>157.559.200</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>248.648.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11 unit	104.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11 unit	153.200.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	37 unit	23.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	37 unit	25.700.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	30.059.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	69.748.000,00	

2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	43,28%	2.998.470.128	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	43,28%	4.375.076.853	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya</b>	17,5%	2.998.470.128	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya</b>	17,5%	4.375.076.853	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan social masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	35 kelompok	2.998.470.128	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan social masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	95 kelompok	4.375.076.853	
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan</b>	100%	1.017.095.485	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan</b>	100%	1.351.400.485	

			<b>Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)('%)</b>					<b>Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)('%)</b>			
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (persen)</b>	100	1.017.095.485	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (persen)</b>	100	1.351.400.485	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial (orang)	95 orang	123.833.250	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, pengemis gelandangan, penyandang penyakit sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan bimbingan sosial (orang)	95 orang	1.018.877.235,00	
	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	60 orang	849.742.235	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	60 orang	1.100.477.235	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	1 kali	43.520.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	1 kali	194.433.250,00	
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>	8,36%	542.227.600	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>	8,36%	542.227.600,00	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	1 dokumen	542.227.600	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	1 dokumen	542.227.600,00	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	31997	284.772.600	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	31997	284.772.600,00	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Luwu Timur	jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000	257.455.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000	257.455.000,00	
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah</b>	100	213.499.490	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah</b>	100	297.070.770,00	

			<b>Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat (%)</b>					<b>Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat (%)</b>			
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	100 %	213.499.490	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	100 %	297.070.770,00	
	Penyediaan Makanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	200 jiwa	213.499.490	Penyediaan Makanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	200 jiwa	297.070.770,00	
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	100%	119.880.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	100%	179.690.000,00	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kec. Malili, Wotu, Mangkuta na	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	3 unit	119.880.000	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kec. Malili, Wotu, Mangkutan a	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	3 unit	179.690.000,00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkuta na	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	119.880.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutan a	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	179.690.000,00	

7	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>	75,25	177.151.665	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>	75,25	213.211.665
		Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	24,75			Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	24,75	
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	7	112.279.625	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	7	122.279.625
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39 opd	112.279.625	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	41 opd	122.279.625
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan</b>	2	64.872.040	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan</b>	2	90.932.040
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	114 orang	19.878.040	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	95 orang	33.438.040

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	Ekonomi					dan Ekonomi				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39 klpok	44.994.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41 klpok	57.494.000
8	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	72,73	<b>836.463.354</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	72,73	<b>890.491.714</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu</b>	<b>11 orang</b>	<b>33.713.106</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu</b>	<b>11 orang</b>	<b>33.713.106</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	33.713.106	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	33.713.106

	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	<b>11 orang</b>	<b>477.386.823</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	<b>11 orang</b>	<b>533.375.183</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	40 orang	477.386.823	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	40 orang	533.255.183	
	<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	<b>10 jenis</b>	<b>325.363.425</b>	<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	<b>10 jenis</b>	<b>323.403.425</b>	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10 jenis	325.363.425	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10 jenis	323.403.425	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga</b>	<b>0,9</b>	<b>60.000.689</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga</b>	<b>0,9</b>	<b>60.000.400</b>	

	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)</b>	<b>50 orang</b>	<b>60.000.689</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)</b>	<b>50 orang</b>	<b>60.000.400</b>	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.000.689	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.000.400	
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>40.777.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>40.777.000</b>	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>40.777.000</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>40.777.000</b>	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen )	1 dokumen	40.777.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen )	1 dokumen	40.777.000	
<b>11</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>180.255.245</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>206.745.245</b>	

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	<b>1</b>	<b>180.255.245</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	<b>1</b>	<b>72.419.550</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	54.999.550	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	72.419.550	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)</b>	<b>1</b>	<b>125.255.695</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)</b>	<b>1</b>	<b>134.325.695</b>	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	1 lembaga	<b>180.255.245</b>	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	1 lembaga	134.325.695	
					<b>9.796.080.281</b>					<b>11.781.940.200</b>	



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **3.1.1. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan yakni 1. *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;* 2. *Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah*

##### **3.1.2. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah : 1). Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2). Meningkatnya pemberdayaan perempuan; 3). Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4). Terpeliharanya ketahanan bencana alam dan social; 5).Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

#### **3.2. Program dan Kegiatan**

Program kegiatan adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan urutan/sistematikanya akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat di lihat pada Form II sebagaimana terlampir.

**Tabel 4**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Pada Perubahan Renja Tahun 2022**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
				Pokok	Peubahan Anggaran
	(2)		(5)	(6)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>9.244.233.634</b>	<b>9.474.136.709</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>9.244.233.634</b>	<b>9.474.136.709</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>3.610.259.625</b>	<b>3.625.248.468</b>
<b>2</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>114.465.010</b>	<b>123.400.010</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	52.936.140	76.481.140
	2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	14.999.180	5.039.180
	3 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3.067.040	3.067.040

	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	43.462.650	38.812.650
<b>2</b>		<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja administrtasi keuangan peranglat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.694.964.565</b>	<b>2.517.594.908</b>
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	22 org	2.625.364.565,00	2.445.324.908,00
	6	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		69.600.000,00	72.270.000,00
<b>3</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.830.000,00</b>	<b>59.830.000,00</b>
	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 orang	59.830.000,00	59.830.000,00
<b>4</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>450.530.850,00</b>	<b>554.565.550,00</b>
	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah komponen instalasai listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.500,00	3.307.500,00
	9	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33.102.150,00	42.211.650,00
	10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	13.850.000,00	17.050.000,00
	11	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000,00	6.540.000,00
	12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	7.250.000,00	7.250.000,00

	13	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	405 kali	386.481.200,00	478.206.400,00
<b>5</b>		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>
	14	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 jenis%	8.000.000,00	8.000.000,00
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Jenis%	16.700.000,00	16.700.000,00
<b>6</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>108.210.000,00</b>	<b>96.510.000</b>
	15	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1250 nomor	1.650.000,00	1.650.000
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	58.560.000,00	42.060.000
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	48.000.000,00	52.800.000,00
<b>7</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>157.559.200,00</b>	<b>248.648.000,00</b>
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11 unit	104.400.000,00	153.200.000,00
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	37 unit	23.100.000,00	25.700.000,00
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	30.059.200,00	69.748.000,00

2			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase meningkatnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	<b>0.84</b>	<b>2.998.470.128,00</b>	<b>4.375.076.853,00</b>
	8		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya</b>	<b>13.5</b>	<b>2.998.470.128,00</b>	<b>4.375.076.853,00</b>
		21	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27 kelompok	2.998.470.128,00	4.375.076.853,00
3			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS</b>	<b>33.46</b>	<b>1.017.095.485,00</b>	<b>1.351.400.485,00</b>
	9		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (persen)</b>	<b>100</b>	<b>1.017.095.485,00</b>	<b>1.351.400.485,00</b>
		23	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial (orang)	109	849.742.235,00	1.100.477.235,00

Renja perubahan dinas social p3a tahun 2022

		25	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	69	43.520.000,00	56.490.000,00
		26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	1 kali	123.833.250,00	194.433.250,00
<b>4</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>8,36</b>	<b>542.227.600,00</b>	<b>542.227.600,00</b>
	<b>11</b>		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data fakir miskin yang dikelola (dokumen)</b>	1 dokumen	<b>542.227.600,00</b>	<b>542.227.600,00</b>
		27	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	31997	284.772.600,00	284.772.600,00
		28	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000	257.455.000,00	257.455.000,00
<b>5</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Prosentase Korban Bencana yang ditangani</b>	<b>100</b>	<b>213.499.490,00</b>	<b>297.070.770,00</b>
	<b>12</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah korban bencana yang ditangani (jiwa)</b>	<b>150 jiwa</b>	<b>213.499.490,00</b>	<b>297.070.770,00</b>
		29	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan makanan (KK)	150 jiwa	213.499.490,00	297.070.770,00
<b>6</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>119.880.000</b>	<b>179.690.000,00</b>
	<b>14</b>		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	<b>3 unit</b>	<b>119.880.000</b>	<b>179.690.000,00</b>

	31	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	<b>119.880.000,00</b>	179.690.000,00
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>993.853.995</b>	<b>1.061.021.522</b>
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA</b>			<b>993.853.995</b>	<b>1.061.021.522</b>
<b>7</b>		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>	<b>76,02</b>	<b>177.151.665</b>	<b>213.211.665</b>
			<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	<b>23,98</b>	<b>-</b>	<b>122.279.625</b>
	<b>15</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	<b>6</b>	<b>112.279.625</b>	122.279.625
	32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39 opd	112.279.625	<b>90.932.040</b>
	<b>16</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan</b>	<b>2</b>	<b>64.872.040</b>	33.438.040
	33	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	64 orang	19.878.040	57.494.000
	34	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39 klpok	44.994.000	<b>213.211.665</b>

8			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	72,73	<b>836.463.354</b>	<b>890.491.714</b>
			<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh</b>	<b>60 orang</b>	<b>33.713.106</b>	<b>33.713.106</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	33.713.106	33.713.106
17			<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	<b>40 orang</b>	<b>477.386.823</b>	<b>533.375.183</b>
		35	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	40 orang	477.386.823	533.375.183
			<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten kota</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	10 jenis	<b>325.363.425</b>	<b>323.403.425</b>
			Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10 jenis	325.363.425	323.403.425

9			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga</b>	<b>0,9</b>	<b>60.000.600</b>	<b>60.000.400</b>
	18		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah masyarakat yang diberiikan konseling kualitas keluarga (orang)</b>	<b>50 orang</b>	<b>60.000.600</b>	<b>60.000.400</b>
		36	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberiikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.000.600	60.000.400
10			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Prosentase OPD yang menyediakan data gender</b>		<b>40.777.000</b>	<b>40.777.000</b>
	19		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>40.777.000</b>	<b>40.777.000</b>
		37	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang diolah (dokumen )	1 dokumen	40.777.000	40.777.000
11			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>180.255.245</b>	<b>206.745.245</b>
	20		<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	<b>1</b>	<b>54.999.550</b>	<b>72.419.550</b>
		38	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	54.999.550	72.419.550

	21		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b> Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)</b>  Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	<b>1</b>  1 lembaga	<b>125.255.695</b>  125.255.695	<b>134.325.695</b>  134.325.695
			<b>TOTAL</b>			<b>9.796.080.192</b>	<b>11.781.940.200</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sebagai bahan acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya RENJA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur diharapkan agar seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan tak kalah pentingnya tetap berkoordinasi dengan SKPD/Instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Malili , 31 Agustus 2022



KABUPATEN DINAS,

**Dr. SUKARTI**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196502101993031015